



## Analisis Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan

Arisa Adiyanti<sup>1</sup>, Agustina Eka Harjanti<sup>2</sup>, Heni Risnawati<sup>3</sup>  
E-mail Korespondensi : [arisaadiyanti50@gmail.com](mailto:arisaadiyanti50@gmail.com)

<sup>1,2,3</sup> Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Kudus, Kudus, Indonesia

### INFO ARTIKEL

*Proses Artikel*

Dikirim : 08/04/2025

Diterima: 03/06/2025

Dipublikasikan:  
21/07/2025

Akreditasi oleh  
Kemenristekdikti  
No.79/E/KPT/2023

### ABSTRAK

Pengelolaan dana desa menjadi isu penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang telah ditentukan. Data yang diperoleh diolah menggunakan aplikasi *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) versi 26 untuk menguji hubungan dan pengaruh antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Sebaliknya, akuntabilitas tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik. Namun, secara simultan, ketiga variabel tersebut tetap memberikan kontribusi terhadap dinamika pengentasan kemiskinan, meskipun terdapat faktor-faktor lain yang juga berperan penting. Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa merupakan kunci dalam mendukung upaya pengurangan kemiskinan, sedangkan akuntabilitas perlu ditinjau ulang dalam praktiknya di lapangan. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam cakupan geografis dan jumlah variabel yang digunakan. Karena dalam penelitian ini hanya menjelaskan penelitian dalam satu desa saja dan hanya menjelaskan tiga variabel saja yaitu variabel transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, studi lanjutan disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti efektivitas kebijakan pemerintah desa, tingkat pendidikan masyarakat, serta pengaruh kondisi ekonomi makro. Selain itu, pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam serta studi komparatif antar desa disarankan guna memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai pengelolaan dana desa dan dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan.

**Kata Kunci :**  
Akuntabilitas; Partisipasi Masyarakat; Pengentasan Kemiskinan;  
Transparansi

---

*Abstract*

*Village fund management is an important issue in poverty alleviation efforts at the local level. This study aims to analyze the influence of transparency, accountability, and community participation on poverty alleviation. This study uses a quantitative method with data collection techniques through distributing questionnaires to predetermined respondents. The data obtained were processed using the Statistical Product and Service Solutions (SPSS) version 26 application to test the relationship and influence between variables. The results of the study indicate that partially, transparency and community participation have a significant effect on poverty alleviation. Conversely, accountability does not show a statistically significant effect. However, simultaneously, the three variables continue to contribute to the dynamics of poverty alleviation, although there are other factors that also play an important role. The main conclusion of this study is that transparency and community involvement in village fund management are key to supporting poverty alleviation efforts, while accountability needs to be reviewed in practice in the field. This study has limitations in geographical coverage and the number of variables used. Because this study only explains research in one village and only explains three variables, namely the variables of transparency, accountability, and community participation. Therefore, further studies are suggested to add other variables such as the effectiveness of village government policies, community education levels, and the influence of macroeconomic conditions. In addition, qualitative approach through in-depth interviews and comparative studies between villages are suggested to gain a more comprehensive understanding of village fund management and its impact on poverty alleviation.*

**Keywords :**

*Accountability; Community Participation; Poverty Alleviation; Transparency*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

---

**PENDAHULUAN**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adat atau yang dikenal dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut mengartikan bahwa adanya otonomi desa menjadi *power* bagi desa dalam usaha mengatur, mengurus dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri sesuai prakarsa dan potensi yang dimiliki.

Pemerintah merupakan suatu lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengurus masalah kenegaraan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta Negara. Pemerintah juga memiliki tugas untuk membuat dan menetapkan hukum dan undang-undang di wilayah tertentu. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan harapan dapat terjadi pemerataan dan keadilan secara menyeluruh (Saputra & Fitriwati, 2023).

Kemiskinan merupakan tantangan kompleks yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat, baik aspek ekonomi maupun aspek sosial. Dalam upaya mengentaskan kemiskinan, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan dana desa sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Dana desa merupakan sarana terpenting dalam mendukung finansial dan memperkuat pemberdayaan masyarakat lokal. Pentingnya penerapan kebijakan dana desa berpotensi memberikan dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan di tingkat desa. Melalui alokasi sumber daya yang cermat dan tepat sasaran, masyarakat desa perlu mengembangkan potensi lokal, meningkatkan kualitas hidup, dan menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan (Indriyani dkk., 2024).

Menurut Freitas & Costa (2022) Sistem Dana Desa mungkin berbeda-beda di setiap wilayah atau negara, namun hal ini bersifat mendasar tujuannya tetap sama-untuk mengalokasikan sumber daya untuk proyek pembangunan lokal, kemiskinan pengentasan, dan kemajuan sosial-ekonomi. Pemimpin lokal atau badan administratif sering kali melakukan hal ini mengawasi penyaluran dan pelaksanaan dana tersebut.

Alokasi dana desa (ADD) merupakan wujud nyata pemenuhan otonomi desa, agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, demokrasi, serta pemberdayaan masyarakat, sedangkan maksud pemberian alokasi dana desa (ADD) adalah sebagai bantuan untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana desa (ADD) harus dilaksanakan dengan prinsip transparan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada public (Rachmawati & Indudewi, 2024).

Selain dana desa, desa juga menerima Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan sumbangan dari pemerintah pusat dan daerah kepada pemerintah desa. Tujuan alokasi dana desa yaitu dapat meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat serta memberdayakan masyarakat desa. Besaran Alokasi dana desa mencapai 30%, yang dialokasikan untuk kebutuhan aparatur pemerintah desa, sementara 70% digunakan untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan publik. Alokasi dana desa tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik yang memberikan manfaat jangka pendek atau kecil, melainkan juga pada anggaran desa yang fokus pada pemberdayaan masyarakat (Iftitah & Wibowo, 2024).

Menurut Saputra & Fitriwati (2023) ADD merupakan dana yang sumbernya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang ditujukan ke desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten atau Kota. Pengelolaan ADD perlu dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, agar pemerintahan desa dapat menjaga kepercayaan publik. Bentuk pertanggungjawaban dan transparansi pemerintah desa terhadap ADD dituangkan kedalam laporan-laporan yang dibuat oleh desa tersebut.

Dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat merupakan sumber pemasukan terbesar bagi desa. Dengan adanya pemasukan dana ini, maka diharapkan kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat. Namun, adanya Dana Desa ini dapat memicu timbulnya masalah baru dalam pengelolaannya, sehingga aparatur desa diharuskan memiliki kemampuan dalam mengelola dana desa tersebut yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam pengelolaannya harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta memprioritaskan kepentingan masyarakat (Hasanah, 2022).

Akuntabilitas merupakan pengendalian aparatur kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintahan salah satunya yaitu Desa (Heni Risnawati dkk., 2022). Menurut (Nuraeni dkk., 2024) mewujudkan pemerintah yang baik dan memperhatikan prinsip akuntabilitas yang dilakukan pada pemerintahan desa merupakan konsekuensi dari otonomi desa. Untuk mewujudkan itu, diperlukan pengawasan dari pemerintah daerah dan provinsi serta peran masyarakat dalam pengelolaan dana desa agar pengelolaan yang dilakukan oleh aparat desa dapat berjalan dan digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Perekonomian nasional yang berlandaskan demokrasi ekonomi sangat penting untuk terwujudnya cita-cita luhur bangsa Indonesia, yaitu terbentuknya masyarakat adil dan makmur sejalan dengan Pancasila & UUD 1945. Sesuai dengan fenomena dan dinamika masyarakat, cita-cita tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan secara terpadu dan sistematis. Upaya pengentasan kemiskinan sangat penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat mengingat kondisi masyarakat Indonesia secara keseluruhan yang terperosok ke dalam kemiskinan dan ketidakberdayaan. Kemiskinan dalam tingkat desa dapat dikurangi dengan cara pengelolaan alokasi dana desa yang sesuai dengan peraturan pemerintah dan situasi yang sedang terjadi pada suatu wilayah tertentu. Dengan adanya pemanfaatan dana desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat tercipta kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara agar dapat mengentaskan kemiskinan dalam Tingkat desa yaitu dengan cara mengelola alokasi dana desa yang sudah di anggarkan dari pemerintah desa untuk kesjahteraan masyarakat desa. Transparansi dari pihak pemerintah desa dapat sangat berpengaruh bagi pengentasan kemiskinan karena nantinya masyarakat akan tau bagaimana dana desa tersebut digunakan dan dialokasikan. Tingkat akuntabilitas dari pemerintah desa sebagai pelaksana dalam pengalokasian dana desa sangat diperlukan karena jika pemerintah desa yang jujur akan memilih untuk mensejahterakan masyarakatnya dan akan membantu masyarakat yang kurang mampu agar dapat hidup yang lebih layak. Serta partisipasi masyarakat yang aktif akan sangat membantu bagi kesejahteraan dalam hidup karena saat masyarakat tersebut ikut aktif dalam membantu menyampaikan aspirasinya maka pemerintah desa akan tau apa saja keluhan kesah yang sedang di resahkan oleh masyarakat tersebut. Dan jika terdapat aspirasi tentang Masyarakat yang kurang mampu dalam suatu desa tersebut maka pemerintah desa akan cepat tau dan akan segera di prioritaskan untuk membantu warga yang sedang kesusahan tersebut.



**Gambar 1. Sustainable Development Goals Desa Jepang Tahun 2022**

Dari gambar diatas dapat dilihat *Sustainable Development Goals* (SDGS) Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. Tahun 2022 dengan berfokus pada SDGS No.1 Desa Tanpa Kemiskinan. Indikator ini mencerminkan tingkat keberhasilan desa dalam mengurangi kemiskinan di semua dimensinya. Dengan skor tertinggi yaitu 100, untuk Desa Jepang sendiri berada pada skor 69,24 dengan artian desa telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hal ini mencerminkan efektivitas berbagai program yang bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa melalui pemanfaatan dana desa yang optimal untuk bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan akses ke layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan.

- 2) Pengembangan Program Inovatif dengan adanya inisiatif lokal yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan mendorong kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tingkat desa.
- 3) Keterlibatan Masyarakat dan *Stakeholder* dengan cara Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, serta dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat.

Meskipun demikian, skor ini juga menandakan bahwa masih terdapat tantangan yang harus diatasi untuk mencapai angka yang lebih tinggi, seperti pemerataan manfaat program dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada. Dengan upaya yang konsisten, desa memiliki potensi untuk mencapai target pengentasan kemiskinan secara penuh.

Sebagian besar penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Hasanah (2022) dan Ringo (2024), berfokus pada pengelolaan dana desa dengan indikator utama seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Namun, penelitian ini menambahkan dimensi baru dengan mengevaluasi tingkat keberhasilan program melalui indikator pengentasan kemiskinan secara langsung. Penelitian ini mengaitkan dengan tujuan SDGS, khususnya SDGS No. 1 (Desa Tanpa Kemiskinan). Dengan menilai bagaimana partisipasi masyarakat berkontribusi pada keberhasilan program pengentasan kemiskinan, penelitian ini menambah dimensi baru yang lebih aplikatif. Penggunaan Desa Jepang sebagai lokasi studi dengan data terkini tahun 2024 memberikan relevansi dan konteks lokal yang unik dibandingkan penelitian sebelumnya yang cenderung menggunakan lokasi berbeda.

Berdasarkan latar belakang di atas, meskipun berbagai penelitian terdahulu telah mengulas aspek pengelolaan dana desa dengan fokus pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, namun sebagian besar studi tersebut belum secara menyeluruh mengaitkan efektivitas pengelolaan dana desa dengan indikator keberhasilan pengentasan kemiskinan secara langsung, khususnya dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin ke-1 yaitu "Desa Tanpa Kemiskinan". Penelitian (Hasanah, 2022), (Ringo, 2024) dan lainnya cenderung menitikberatkan pada mekanisme administratif dan proses pengelolaan dana, tanpa mengevaluasi secara komprehensif hasil akhir atau dampak riil dari program-program tersebut terhadap kehidupan masyarakat desa yang rentan secara ekonomi. Selain itu, belum banyak studi yang menyoroti peran aktif masyarakat sebagai penguat keberhasilan program, terutama dalam proses perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan kegiatan berbasis dana desa. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan mengevaluasi bagaimana penggunaan dana desa, partisipasi masyarakat, serta kolaborasi pemangku kepentingan dapat secara nyata menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan skor capaian SDGs, dengan mengambil Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus sebagai studi kasus lokal yang kontekstual dan berbasis data aktual tahun 2024. Pendekatan ini menawarkan dimensi baru yang aplikatif dan relevan sebagai acuan bagi replikasi kebijakan serupa di wilayah desa lain di Indonesia.

## KAJIAN PUSTAKA

### **Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Kesepakatan dari setidaknya dua pihak, dalam hal ini dinamika prinsipal-agen, merupakan inti dari teori keagenan. Gambaran keterkaitan warga negara dan pemerintah demokratis mereka adalah sebagai hubungan keagenan. Dalam bentuk pemerintahan ini, warga negara mendelegasikan tanggung jawab tertentu kepada negara. Laporan yang merinci rencana pemerintah untuk memajukan kepentingan masyarakat adalah syarat penting untuk kepercayaan publik. Anggota masyarakat juga memiliki hak untuk meninjau dan mengomentari laporan tersebut (Ringo, 2024).

Dalam teori keagenan, terdapat hubungan antara *principal* (masyarakat) dan *agent* (pemerintah desa). Terkait pengentasan kemiskinan, masyarakat percaya kepada pemerintah desa dalam menangani ADD secara baik. Dalam kapasitasnya sebagai agen, pemdes harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh prinsipal. Dalam konteks ini, *asimetri* informasi sering terjadi karena pemerintah desa memiliki akses langsung ke informasi keuangan, sedangkan masyarakat

tidak selalu mendapatkan informasi yang lengkap dan transparan. Penelitian ini mengevaluasi sejauh mana transparansi dapat mengurangi kesenjangan informasi antara kedua pihak.

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa menjadi penting untuk memastikan bahwa pemerintah desa bertanggung jawab kepada masyarakat atas keputusan dan tindakan mereka. Ini selaras dengan prinsip *checks and balances* yang dijelaskan dalam teori keagenan. Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, penelitian ini mencerminkan upaya mengurangi potensi konflik yang muncul dari kepentingan yang tidak sejalan antara principal dan agent. Partisipasi masyarakat menciptakan rasa kepemilikan bersama terhadap program yang dijalankan. Jika asimetri informasi tidak dikelola, ada risiko penyalahgunaan wewenang atau korupsi dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini menilai bagaimana transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dapat mengurangi potensi risiko ini untuk mendukung pengentasan kemiskinan.

Dengan demikian, teori keagenan menjadi dasar teoretis yang relevan untuk menjelaskan hubungan antara variabel dalam penelitian ini, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, serta pengaruhnya terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Jepang Kecamatan Mejubo Kabupaten Kudus.

### **Transparansi**

Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan penyediaan informasi dan kemudahan akses informasi yang akurat dan memadai kepada publik. Adanya transparansi memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada publik untuk mengetahui informasi yang menyangkut kepentingan, aspirasi, dan pemenuhan kebutuhan khalayak umum (Putri dkk, 2024). Transparansi adalah keterbukaan informasi terkait pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pelaporan. Menurut Putri & Maryono (2022), transparansi memegang peranan penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Selain itu, transparansi juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi penggunaan dana desa, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran. Transparansi dalam pengelolaan dana desa memastikan bahwa informasi mengenai penggunaan dana desa tersedia secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memastikan penggunaan dana yang lebih efektif untuk program pengentasan kemiskinan. Indikator pertanyaan yang digunakan penulis yaitu kebebasan berpendapat dalam musyawarah, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, aksesibilitas terhadap dokumen dan informasi perencanaan, pemanfaatan media sosial sebagai sarana informasi, keterbukaan informasi pelaksanaan program, transparansi pemerintah desa, dan akuntabilitas pelaksanaan dana desa.

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan pengendalian aparatur kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintahan salah satunya yaitu desa (Heni Risnawati dkk., 2022). Menurut Nuraeni dkk (2024) mewujudkan pemerintah yang baik dan memperhatikan prinsip akuntabilitas yang dilakukan pada pemerintahan desa merupakan konsekuensi dari otonomi desa. Untuk mewujudkan itu, diperlukan pengawasan dari pemerintah daerah dan provinsi serta peran masyarakat dalam pengelolaan dana desa agar pengelolaan yang dilakukan oleh aparat desa dapat berjalan dan digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan penelitian yang sama, akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berkaitan dengan kewajiban pemerintah desa untuk memberikan laporan berkala dan terbuka terhadap semua aspek penggunaan dana desa, mulai dari penerimaan hingga penggunaannya dalam berbagai program pembangunan hal ini berdasarkan analisis dan uji hipotesis dari Hasanah (2022). Indikator pertanyaan yang digunakan penulis yaitu partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, orientasi pengelolaan pada kepentingan masyarakat, transparansi dan aksesibilitas pengelolaan dana desa, pengawasan terhadap pelaksanaan dana desa, pentingnya akuntabilitas dalam kinerja pemerintah desa.

### **Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa. Partisipasi ini dianggap sebagai cara efektif untuk memastikan bahwa program yang dibiayai dengan dana desa benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Salah satu contoh keterlibatan masyarakat adalah ketika warga membantu memutuskan bagaimana dana desa akan didistribusikan. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mengalokasikan anggaran desa untuk program-program penting. Dana desa merupakan sarana terpenting dalam mendukung finansial dan memperkuat pemberdayaan masyarakat lokal. Menurut Warda dkk (2024), partisipasi masyarakat yang aktif dapat menurunkan kemiskinan karena masyarakat turut terlibat dalam evaluasi, pengawasan, dan bahkan perencanaan program-program yang berkaitan langsung dengan pengentasan kemiskinan. Indikator pertanyaan yang digunakan penulis yaitu keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pengusulan rencana anggaran oleh masyarakat, partisipasi dalam rapat pembahasan anggaran, keterlibatan dalam penyusunan anggaran dana desa, pengawasan dan pelaporan oleh masyarakat, pemberian penilaian atas pelaksanaan anggaran, keterlibatan dalam program pemberdayaan masyarakat, dan kontribusi ide, keahlian, dan tenaga dalam program desa.

### **Pengentasan Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan sebuah problema utama yang ada di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Sejak masa berdirinya Indonesia hingga kini, kemiskinan masih menjadi masalah utama yang tak pernah habis untuk dikaji. Sebagai persoalan yang kompleks dan kronis, kemiskinan perlu melibatkan semua komponen permasalahan dalam menganalisisnya dalam menentukan strategi penanganan apa yang tepat dan berkelanjutan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Berbagai macam kebijakan dalam membuat strategi pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan berbagai program-program bantuan terhadap masyarakat miskin. Baik berupa bantuan di bidang kesehatan, pendidikan, maupun program-program pemerintah lainnya dalam pemberdayaan masyarakat (Alawiyah & Setiawan, 2021). Transparansi dalam pengelolaan dana desa memastikan bahwa informasi mengenai penggunaan dana desa tersedia secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memastikan penggunaan dana yang lebih efektif untuk program pengentasan kemiskinan, seperti pemberdayaan ekonomi lokal dan pembangunan infrastruktur. Akuntabilitas memastikan bahwa pemerintah desa bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan. Hal ini menciptakan tekanan positif bagi pemerintah desa untuk memprioritaskan alokasi dana pada program-program pengentasan kemiskinan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan dana desa memungkinkan masyarakat untuk berperan aktif dalam menentukan prioritas pembangunan. Keterlibatan ini memastikan program-program desa lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dampak pada pengentasan kemiskinan menjadi lebih signifikan. Kombinasi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat menciptakan sinergi yang memperkuat tata kelola desa. Hal ini sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk mengurangi kemiskinan, sebagaimana dicapai melalui optimalisasi dana desa yang terfokus pada kebutuhan masyarakat lokal. Pentingnya penerapan kebijakan dana desa berpotensi memberikan dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan di tingkat desa. Melalui alokasi sumber daya yang cermat dan tepat sasaran, masyarakat desa perlu mengembangkan potensi lokal, meningkatkan kualitas hidup, dan menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan (Indriyani dkk, 2024). Indikator pertanyaan yang digunakan penulis yaitu aksesibilitas layanan kesehatan, pemanfaatan bantuan dana desa untuk kebutuhan ekonomi, ketersediaan lapangan kerja melalui BumDes, keseimbangan antara pendapatan dan biaya hidup, kebebasan berpendapat dan pelayanan setara dalam musyawarah, dan transparansi informasi dari aparat pemerintah.

### **Hubungan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dan Pengentasan Kemiskinan**

Menurut Putri & Maryono (2022), transparansi memegang peranan penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Selain itu, transparansi juga mendorong

masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi penggunaan dana desa, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran. Dengan bersikap terbuka dan mudah diakses, pemerintah memungkinkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) & masyarakat dalam mengawasi kebijakan keuangan daerah yang dibuatnya (Khasanah & Marisan, 2022). Hal ini sejalan dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa asimetri informasi dapat dikurangi dengan keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana desa dikelola. Dengan adanya transparansi, masyarakat sebagai principal dapat mengawasi pemerintah desa sebagai agent, sehingga penggunaan dana menjadi lebih optimal. Transparansi ialah variabel yang signifikan untuk Pengelolaan dana desa, sesuai dengan analisis dan uji hipotesis yang dilakukan oleh Hasanah (2022).

H<sub>1</sub> : Transparansi pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Jepang.

### **Hubungan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dan Pengentasan Kemiskinan**

Menurut Khasanah & Marisan (2022) akuntabilitas mengacu pada tanggungjawab pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa kepada masyarakat. Berdasarkan penelitian sama, kredibilitas dalam manajemen dana desa berkaitan dengan kewajiban pemerintah desa memberi laporan berkala dan terbuka terhadap semua aspek penggunaan dana desa, mulai dari penerimaan hingga penggunaannya dalam berbagai program pembangunan. Menurut penelitian yang dikutip oleh Ringo (2024), akuntabilitas secara signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Putri dan Maryono (2022) menemukan akuntabilitas sangat meningkatkan pengelolaan dana desa.

H<sub>2</sub> : Akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Jepang.

### **Hubungan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Dan Pengentasan Kemiskinan**

Menurut (Warda dkk., 2024), partisipasi masyarakat yang aktif dapat menurunkan kemiskinan karena masyarakat turut terlibat dalam evaluasi, pengawasan, dan bahkan perencanaan program-program yang berkaitan langsung dengan pengentasan kemiskinan. Sebagai ukuran kualitas hidup di suatu komunitas, standar hidup memberikan gambaran mengenai kesejahteraan masyarakat. Menurut temuan Ringo (2024), ada keterkaitan yang positif substansial keterlibatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Efisiensi pengelolaan dana desa meningkat saat masyarakat berpartisipasi aktif (Sakdiyah dkk, 2023) .

H<sub>3</sub> : Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Jepang.

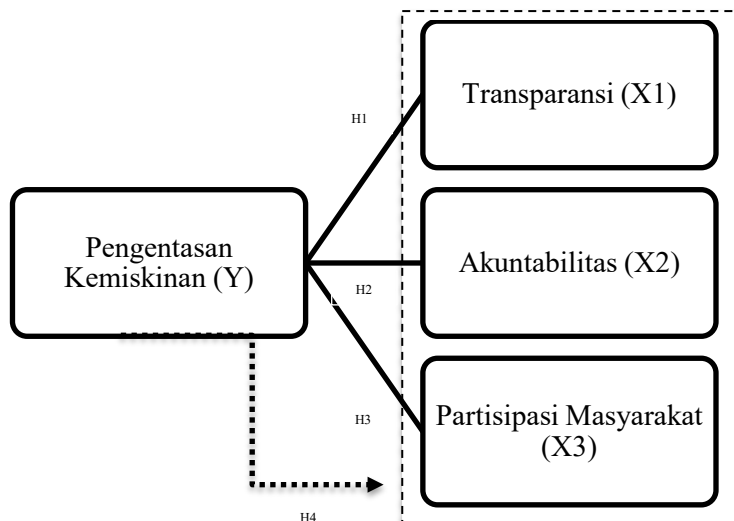
### **Hubungan Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Pengentasan Kemiskinan**

Ketika keuangan desa dikelola secara transparan, masyarakat memiliki kemudahan akses untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana dana tersebut digunakan. Kepercayaan masyarakat akan meningkat dan memastikan penggunaan dana yang lebih efektif untuk program pengentasan kemiskinan, seperti pemberdayaan ekonomi lokal dan pembangunan infrastruktur. Akuntabilitas memastikan bahwa tanggungjawab pemdes atas pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan. Hal ini menciptakan tekanan positif bagi pemerintah desa untuk memprioritaskan alokasi dana pada program-program pengentasan kemiskinan. Keterlibatan masyarakat dalam pengolah dan pengawasan dana desa memungkinkan masyarakat untuk berperan aktif dalam menentukan prioritas pembangunan. Keterlibatan ini memastikan program-program desa lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dampak pada pengentasan kemiskinan menjadi lebih signifikan. Pemerintahan desa yang lebih baik merupakan hasil dari sinergi antara keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dengan memaksimalkan dana desa untuk kebutuhan masyarakat, sehingga hal ini sejalan dengan tujuan tersebut.

ditarik hipotesis berikut:

H<sub>4</sub> : Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Jepang.

Berikut kerangka penelitian untuk menunjang hipotesis diatas:



**Gambar 2. Kerangka Penelitian**

## METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kuantitatif yang didasarkan pada survei dengan kuesioner, kemudian akan dibagikan ke responden. Variabel independen yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Variabel dependen yang digunakan adalah Pengentasan kemiskinan desa. Jenis data pada penelitian ini yaitu menggunakan data kuantitatif, dengan mengumpulkan serta mengolah data berupa angka untuk menjelaskan sesuai permasalahan dalam penelitian. Hasil jawaban kuesioner yang disebarkan dilihat menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Analisis data menggunakan bantuan program SPSS 26 yaitu analisis regresi linear berganda. Analisis data meliputi pengujian normalitas, kemudian untuk uji hipotesis, dan uji simultan untuk mengetahui hubungan antara ketiga variabel tersebut. Populasi yang digunakan yaitu seluruh warga Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Dengan pengambilan sampel menggunakan kriteria tertentu yang dijelaskan dibawah ini. Dengan jumlah sampel yaitu 72 responden. Teknik sampel menggunakan Purposive Sampling. Berikut kriteria sampel dalam penelitian ini:

1. Kepala Desa Jepang
2. Sekretaris Desa Jepang
3. Bendahara Desa Jepang
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Jepang
5. Ketua Rukun Warga Desa Jepang
6. Ketua Rukun Tetangga Desa Jepang

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Analisis ini bertujuan untuk meninjau jawaban dari responden terhadap masing-masing pertanyaan yang menjadi instrumen penelitian ini. Sementara itu, rumus yang diberikan oleh Sudjana (2011: 47) dalam (Novita, 2024) digunakan untuk memastikan panjang kelas interval adalah sebagai berikut :

Nilai Terendah = 1

Nilai Tertinggi = 5

Inteval/Rentang = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah  
 $= 5 - 1 = 4$

Banyak Kelas/Jenjang = 5

Jarak Interval  $4 : 5 = 0,8$

Dengan menggunakan pedoman tersebut, (Efendi dkk., 2024) menentukan lima jenjang kriteria yaitu :

Nilai skor antara  $1 \leq 1.80$  Sangat Tidak Setuju.

Nilai skor antara  $1.81 \leq 2.60$  Tidak Setuju.

Nilai skor antara  $2.61 \leq 3.40$  Ragu-Ragu.

Nilai skor antara  $3.41 \leq 4.20$  Setuju.

Nilai skor diatas  $4.21 \leq 5,00$  Sangat Setuju.

Dengan menggunakan informasi ini, persentase responden yang masuk ke dalam setiap kategori dapat dihitung.

**Tabel 1. Tanggapan Responden Mengenai Transparansi Pengelolaan Dana Desa**

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS	Jumlah	Rata-Rata	Kategori
1	X1.1				44	28	72	4.39	Sangat Setuju
2	X1.2			5	43	24	72	4.26	Sangat Setuju
3	X1.3				49	23	72	4.32	Sangat Setuju
4	X1.4		1	4	47	20	72	4.19	Setuju
5	X1.5			1	43	28	72	4.38	Sangat Setuju
6	X1.6			1	37	34	72	4.46	Sangat Setuju
7	X1.7				42	30	72	4.42	Sangat Setuju
8	X1.8				33	39	72	4.54	Sangat Setuju
<b>Rata - Rata</b>								4.37	Sangat Setuju

Sumber : Data Primer Diolah, 2025

Tabel 1 terlihat bahwa untuk seluruh indikator pernyataan, *mean* tanggapan terkait transparansi pengelolaan dana desa ialah 4,37, sehingga masuk kategori “Sangat Setuju”.

**Tabel 2. Tanggapan Responden Mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS	Jumlah	Rata-Rata	Kategori
1	X2.1			8	33	31	72	4.32	Sangat Setuju
2	X2.2		1	4	42	25	72	4.26	Sangat Setuju
3	X2.3			2	34	36	72	4.47	Sangat Setuju
4	X2.4			11	50	11	72	4	Setuju
5	X2.5			2	26	44	72	4.58	Sangat Setuju
<b>Rata - Rata</b>								4.33	Sangat Setuju

Sumber : Data Primer Diolah, 2025

Tabel 2 terlihat data agregat untuk klaim adalah 4,33, menempatkannya kategori “Sangat Setuju”. Terlihat mayoritas masyarakat mempunyai kesan sangat baik terhadap aspek-aspek yang dievaluasi. Meskipun satu pernyataan (X2.4) mendapat nilai “Setuju” (skor 4.00), mayoritas pernyataan mendapat nilai “Sangat Setuju”, yang mengindikasikan bahwa responden memiliki kesan yang positif terhadap aspek-aspek tersebut.

**Tabel 3. Tanggapan Responden Mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa**

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS	Jumlah	Rata-Rata	Kategori
1	X3.1		3	4	46	19	72	4.13	Setuju
2	X3.2		10	23	27	12	72	3.57	Setuju
3	X3.3		1	5	45	21	72	4.19	Setuju
4	X3.4		1	5	36	30	72	4.32	Sangat Setuju
5	X3.5			2	47	23	72	4.29	Sangat Setuju
6	X3.6		1	8	46	17	72	4.1	Setuju
7	X3.7			3	42	27	72	4.33	Sangat Setuju
8	X3.8			1	17	54	72	4.74	Sangat Setuju
<b>Rata - Rata</b>								4.21	Setuju

Sumber : Data Primer Diolah, 2025

Tabel 3, terlihat mean dari variabel partisipasi masyarakat adalah 4,18, dengan total skor 4,21 (dalam kategori “ Setuju”), dari para responden. Dari delapan pernyataan, lima berada dalam kategori " Setuju ", sementara tiga lainnya (X3.4, X3.5, dan X3.8) termasuk dalam kategori "Sangat Setuju ". Meskipun secara umum aspek yang diukur mendapat penilaian positif, terdapat satu pernyataan (X3.2) dengan skor 3,57, yang lebih rendah dibandingkan lainnya. Hal ini terlihat bahwa ada ruang untuk peningkatan pada aspek tertentu guna meningkatkan persepsi responden secara keseluruhan.

**Tabel 4. Tanggapan Responden Mengenai Pengentasan Kemiskinan Desa**

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS	Jumlah	Rata-Rata	Kategori
1	X4.1			9	44	19	72	4.14	Sangat Setuju
2	X4.2		1	6	35	30	72	4.31	Sangat Setuju
3	X4.3		15	34	21	2	72	3.14	Ragu-Ragu
4	X4.4		5	26	33	8	72	3.61	Setuju
5	X4.5			2	47	23	72	4.29	Sangat Setuju
6	X4.6			1	43	72	72	4.38	Sangat Setuju
<b>Rata - Rata</b>								3.98	Setuju

Sumber : Data Primer Diolah, 2025

Tabel 4 terlihat bahwa variabel partisipasi masyarakat mendapatkan skor rata-rata 3,98 dari responden. Hal ini termasuk dalam kategori “ Setuju ” untuk semua pernyataan indikator.

#### Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

**Tabel 5. Hasil Uji Validitas**

No	Variabel	Indikator	Korelasi	r-tabel	Keterangan
1	Transparansi				
		1	0,577	0,329	Valid
		2	0,521	0,329	Valid
		3	0,722	0,329	Valid
		4	0,569	0,329	Valid
	5	0,437	0,329	Valid	

No	Variabel	Indikator	Korelasi	r-tabel	Keterangan
		6	0,542	0,329	Valid
		7	0,688	0,329	Valid
		8	0,427	0,329	Valid
2	Akuntabilitas				
		1	0,683	0,329	Valid
		2	0,616	0,329	Valid
		3	0,755	0,329	Valid
		4	0,566	0,329	Valid
		5	0,633	0,329	Valid
3	Partisipasi Masyarakat				
		1	0,678	0,329	Valid
		2	0,504	0,329	Valid
		3	0,732	0,329	Valid
		4	0,857	0,329	Valid
		5	0,580	0,329	Valid
		6	0,612	0,329	Valid
		7	0,757	0,329	Valid
		8	0,541	0,329	Valid
4	Pengentasan Kemiskinan				
		1	0,532	0,329	Valid
		2	0,416	0,329	Valid
		3	0,789	0,329	Valid
		4	0,666	0,329	Valid
		5	0,417	0,329	Valid
		6	0,674	0,329	Valid

Sumber : Data Primer Diolah, 2025

Terdapat nilai korelasi (r-hitung) > r-tabel (0,329) untuk semua indikator dikeempat variabel - Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Pengentasan Kemiskinan - berdasarkan tabel 5 hasil uji validitas. Terbukti semua indikator valid dan dipakai dalam pengukuran variabel

**Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas**

No	Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
1	Transparansi	0,672	Reliabel
2	Akuntabilitas	0,662	Reliabel
3	Partisipasi Masyarakat	0,806	Reliabel
4	Pengentasan Kemiskinan	0,615	Reliabel

Sumber : Data Primer Diolah, 2025

Hasil uji reliabilitas terlihat semua variabel nilai > 0,6 , instrumen penelitian dapat dikategorikan reliabel (tabel 6 hasil dengan metode *Cronbach's Alpha*).

**Uji Normalitas****Tabel 7. Hasil Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		72
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.93909117
Most Extreme Differences	Absolute	.072
	Positive	.072
	Negative	-.069
Test Statistic		.072
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Data Primer Diolah, 2025

Nilai Sig diperoleh dari tabel 7, yang berisi hasil *Kolmogorov-Smirnov* > 0,05, dengan 2-tailed = 0,200. Hasil ini terlihat distribusi data yang normal. Dengan mempertimbangkan hal berikut: nilai Asymp. Sig, menunjukkan angka (0,200) > 0,05 maka dapat disimpulkan hasil data mengikuti distribusi normal.

**Uji Regresi Linear Berganda****Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Model	Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.597	3.522		1.873	.065
Transparansi	.235	.113	.250	2.068	.042
Akuntabilitas	-.022	.163	-.019	-.133	.894
Partisipasi Masyarakat	.283	.101	.393	2.813	.006

a. Dependent Variable: Pengentasan Kemiskinan

Sumber : Data Primer Diolah, 2025

Persamaan regresi linier berikut ini, berdasarkan data pada tabel 8, merepresentasikan variabel-variabel penelitian dan hubungannya:

$$\text{Pengentasan Kemiskinan} = 6.597 + 0.235 (\text{Transparansi}) - 0.022 (\text{Akuntabilitas}) + 0.283 (\text{Partisipasi Masyarakat}) + e$$

Dari persamaan, disimpulkan:

1. Konstanta = 6.597 terlihat jika semua variabel independen 0, maka nilai pengentasan kemiskinan tetap berada pada angka tersebut.
2. Variabel transparansi dengan angka koefisien regresi = 0.235 terlihat bahwa setiap peningkatan transparansi = satu unit akan meningkatkan pengentasan kemiskinan sebesar 0.235 unit. Nilai t = 2.068 dengan *p-value* = 0.042 (< 0.05), = transparansi berdampak signifikan ke pengentasan kemiskinan.
3. Variabel akuntabilitas dengan angka Koefisien regresi = -0.022 terlihat akuntabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap pengentasan kemiskinan, namun sangat kecil. Nilai t = -0.133

dengan  $p\text{-value} = 0.894 (> 0.05)$ , akuntabilitas tidak berdampak signifikan ke pengentasan kemiskinan.

- Variabel partisipasi Masyarakat dengan Koefisien regresi = 0.283 terlihat bahwa setiap peningkatan partisipasi masyarakat satu unit akan meningkatkan pengentasan kemiskinan sebesar 0.283 unit. Nilai  $t = 2.813$  dengan  $p\text{-value} = 0.006 (< 0.05)$ , partisipasi masyarakat berdampak signifikan ke pengentasan kemiskinan.

### Uji Hipotesis

**Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis**

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized		Standardized		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	6.597	3.522		1.873	.065
	Transparansi	.235	.113	.250	2.068	.042
	Akuntabilitas	-.022	.163	-.019	-.133	.894
	Partisipasi Masyarakat	.283	.101	.393	2.813	.006

a. Dependent Variable: Pengentasan Kemiskinan

Sumber : Data Primer Diolah, 2025

Hasil diatas disimpulkan:

#### 1. Variabel Transparansi

Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa Transparansi pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Jepang. Hasil uji T menunjukkan bahwa nilai *signifikansi* ( $p\text{-value}$ ) = 0.042 (di bawah 0.05), sehingga hipotesis diterima. Transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Artinya, semakin tinggi transparansi, semakin besar kontribusinya dalam upaya pengentasan kemiskinan.

#### 2. Variabel Akuntabilitas

Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa Akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Jepang. Hasil uji T menunjukkan bahwa nilai *signifikansi* ( $p\text{-value}$ ) = 0.894 (di atas 0.05), sehingga hipotesis ditolak. Akuntabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam model ini, perubahan tingkat akuntabilitas tidak berkontribusi secara signifikan terhadap upaya pengentasan kemiskinan.

#### 3. Variabel Partisipasi Masyarakat

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Jepang. Hasil uji T menunjukkan bahwa nilai *signifikansi* ( $p\text{-value}$ ) = 0.006 (di bawah 0.05), sehingga hipotesis diterima. Partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, semakin efektif upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan.

### Uji Simultan

**Tabel 10. Hasil Uji Simultan**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	111.646	3	37.215	9.479	.000 <sup>b</sup>
	Residual	266.965	68	3.926		
	Total	378.611	71			

a. Dependent Variable: Pengentasan Kemiskinan

---

**b. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Akuntabilitas**


---

Sumber : Data Primer Diolah, 2025

Terdapat perbedaan yang signifikan antara  $F$  hitung = 9.479 dengan  $F$  tabel = 3,13, serta antara nilai  $p$ -value = 0,000, tingkat kesalahan  $\alpha = 0,05$ , sesuai hasil uji simultan. ini membuktikan hipotesis yang diajukan benar, sehingga dapat dikatakan bahwa keterlibatan masyarakat, keterbukaan, dan akuntabilitas memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan. Sederhananya, jika dilihat secara keseluruhan, ketiga variabel independen tersebut dapat menjelaskan perbedaan pendekatan dalam mengurangi kemiskinan..

### **Pembahasan**

#### **Analisis Pengaruh Transparansi Dalam Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Desa Jepang.**

Hasil pengujian hipotesis pertama ( $H_1$ ) yang dilihat dari hasil uji parsial menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan dengan nilai  $t$  hitung = 2.068 dan  $p$ -value = 0.042 ( $< 0.05$ ). Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian (Rukmana dkk, 2023) yang menyatakan bahwa transparansi keuangan desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Maryono, 2022) yang menyatakan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan desa meningkatkan efektivitas program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan Dana Desa memiliki pengaruh positif terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Jepang. Hal ini sejalan dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa asimetri informasi dapat dikurangi dengan keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana desa dikelola. Dengan adanya transparansi, masyarakat sebagai principal dapat mengawasi pemerintah desa sebagai agent, sehingga penggunaan dana menjadi lebih optimal.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Jepang, semakin efektif program-program pengentasan kemiskinan yang dapat dijalankan oleh pemerintah Desa Jepang. Transparansi memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi terkait penggunaan dana desa, sehingga meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta perencanaan program-program pengentasan kemiskinan di Desa Jepang.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Sari dkk, 2022) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan transparansi keuangan desa terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa.

#### **Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dalam Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Desa Jepang.**

Hasil pengujian hipotesis kedua ( $H_2$ ) yang dilihat dari hasil uji parsial, akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan dengan nilai  $t$  hitung = -0.133 dan  $p$ -value = 0.894 ( $> 0.05$ ). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun akuntabilitas penting dalam tata kelola pemerintahan desa, dalam konteks penelitian ini, mekanisme akuntabilitas yang ada belum memberikan dampak nyata terhadap pengentasan kemiskinan. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah kurangnya efektivitas dalam pelaksanaan sistem pelaporan dan pengawasan, sehingga masyarakat tidak dapat secara langsung merasakan manfaat dari akuntabilitas tersebut. Serta dalam penelitian ini, akuntabilitas dinyatakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan, dimana pernyataan tersebut sejalan dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa pengelolaan dana desa yang tidak akuntabel dapat menimbulkan *moral hazard*, di mana agent bertindak lebih mengutamakan kepentingannya sendiri dibandingkan kepentingan masyarakat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada sistem pertanggungjawaban formal, mekanisme pengawasan dari masyarakat masih lemah, sehingga akuntabilitas belum memberikan dampak besar terhadap pengentasan kemiskinan.

Temuan ini didukung oleh penelitian (Putri dkk, 2021) yang menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat, dan penelitian yang dilakukan oleh (Ardianti, 2019) yang menyatakan bahwa akuntabilitas pemerintah desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengentasan kemiskinan.

#### **Analisis Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Desa Jepang.**

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) yang dilihat dari uji parsial menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan dengan nilai  $t$  hitung = 2.813 dan  $p$ -value = 0.006 ( $< 0.05$ ). Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian (Sakdiyah dkk, 2023) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat dalam penelitian ini terbukti berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Jepang. Dalam teori keagenan, keterlibatan *principal* (masyarakat) dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan publik. Partisipasi aktif masyarakat memastikan bahwa alokasi dana desa sesuai dengan kebutuhan lokal dan mengurangi potensi penyalahgunaan oleh pemerintah desa.

Ini berarti semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Jepang, maka semakin besar kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan yang ada di Desa Jepang. Partisipasi masyarakat memungkinkan adanya keterlibatan langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program-program pembangunan. Dengan adanya partisipasi aktif, program yang dijalankan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga memberikan dampak yang lebih optimal.

Temuan ini didukung oleh penelitian (Putri & Maryono, 2022) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa, dan penelitian yang dilakukan oleh (Warda dkk, 2024) yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa berkontribusi besar dalam mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan.

#### **Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Desa Jepang.**

Hasil pengujian hipotesis keempat (H4) yang dilihat berdasarkan hasil uji simultan menunjukkan bahwa variabel transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan dengan nilai  $F$  hitung = 9.479 yang lebih besar dari  $F$  tabel = 3.13 dan nilai signifikansi 0.000 ( $< 0.05$ ). Hal ini mengindikasikan bahwa kombinasi dari ketiga variabel independen ini mampu menjelaskan pengentasan kemiskinan di Desa Jepang. Berdasarkan hasil di atas secara simultan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dapat berpengaruh signifikan dikarenakan jika ketiga indikator tersebut dijalankan dengan baik sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan dengan mempertimbangkan masalah yang sedang dialami masyarakat maka akan dapat secara langsung dapat membantu mengentaskan kemiskinan di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. Serta meskipun akuntabilitas penting dalam tata kelola pemerintahan desa, dalam konteks penelitian ini, mekanisme akuntabilitas yang ada belum memberikan dampak nyata terhadap pengentasan kemiskinan. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah kurangnya efektivitas dalam pelaksanaan sistem pelaporan dan pengawasan, sehingga masyarakat tidak dapat secara langsung merasakan manfaat dari akuntabilitas tersebut.

Namun, berdasarkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.264, dapat disimpulkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat hanya mampu menjelaskan 26.4% variasi dalam pengentasan kemiskinan, sementara 73.6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

## PENUTUP

Akuntabilitas tidak berkorelasi secara statistik dengan pengurangan kemiskinan di Desa Jepang, tetapi transparansi dan kontribusi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berkorelasi. Hasil terlihat keterbukaan, tanggung jawab, dan keterlibatan masyarakat memang penting, tetapi bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di desa. Keterbatasan studi ini antara lain adalah cakupan geografisnya yang sempit (hanya Desa Jepang, Kecamatan Mejubo, Kabupaten Kudus yang menjadi lokasi studi), sehingga temuan studi ini tidak dapat diterapkan di daerah lain dengan situasi sosial ekonomi yang berbeda. Variabel yang digunakan hanya mempertimbangkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, padahal faktor lain seperti kebijakan pemerintah, tingkat pendidikan, dan kondisi ekonomi makro juga dapat mempengaruhi pengentasan kemiskinan. Guna meningkatkan pengentasan kemiskinan, pemerintah dan masyarakat perlu meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat. Pengembangan sistem akuntabilitas meskipun akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan dalam penelitian ini, sistem pelaporan dan pertanggungjawaban tetap harus diperbaiki agar lebih efektif dan memberikan dampak langsung pada masyarakat. Jika ingin mendapatkan gambaran lengkap tentang bagaimana mengurangi kemiskinan di desa, kita membutuhkan lebih banyak penelitian yang memperhitungkan variabel lain seperti pendidikan, infrastruktur, dan kebijakan sosial. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel baru di penelitian mendatang seperti: efektivitas kebijakan pemerintah desa, pengaruh tingkat pendidikan masyarakat, atau dampak digitalisasi dalam pengelolaan dana desa. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dengan kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam mengenai kendala dan solusi pengelolaan dana desa. Dan dapat melakukan perbandingan dengan desa lain selain Desa Jepang yang memiliki karakteristik serupa untuk mendapatkan gambaran lebih luas mengenai faktor keberhasilan dalam pengelolaan dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah, T., & Setiawan, F. (2021). Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Desa. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 15(2), 131–154. <https://doi.org/10.24815/jsu.v15i2.22392>
- Ardianti, R. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat. *Skripsi. Semarang. UIN Walisongo*, XX(113), 1–2.
- Freitasl, A. da C., & Costa, H. da. (2022). Enhancing Community Welfare: Analysis of Village Fund Management in the Socio-Economic Sector. *Law and Economics*, 16(1), 15–29. <https://doi.org/10.35335/laweco.v16i1.49>
- Hasanah, N. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (di Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat). In *Universitas Islam Walisongo* (Vol. 9).
- Heni Risnawati, Sukma Wijayanti, & Sri Retnoningsih. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati. *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)*, 6(1), 199–211. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v6i1.838>
- Iftitah, A. E., & Wibowo, P. (2024). Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Gowa. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 67–77. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i1.2331>
- Indriyani, M., Merinasilvi, & Liandrainy, V. S. (2024). Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan : Studi Kasus Di Desa Dendun Kecamatan Mantang Melia Indriyani. *CIDEA Journal*, 3(1), 21–29.

- Khasanah, A. N., & Marisan, I. (2022). Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara). *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 6(1), 32–48. <https://doi.org/10.34001/jra.v6i1.189>
- Nuraeni, F., Setiawan, A. B., Kusuma, I. C., & Bogor, U. D. (2024). Pengaruh Transparansi Dan Partisipasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa-Desa Di Kecamatan Cisolok Dan Cikakak. *Journal Of Social Science Research*, 4(5), 2203–2223.
- Putri, A. A. A., Sudiana, I. W., & Putra, I. P. D. S. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 2(2), 258–280. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i2.1543>
- Putri, A. A., Dersanala, D., Nurcahyaningih, R., Saputri, Y. I., & Wulandari, E. (2024). Analisis Permasalahan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Dan Alokasi Dana Simultan Pada Desa Rejosari, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 1(4), 190–195.
- Putri, A. R. L., & Maryono. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 1668–1688.
- Rachmawati, W. C., & Indudewi, D. (2024). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pembangunan Infrastruktur Desa Blerong. *Solusi*, 22(2), 187. <https://doi.org/10.26623/slsi.v22i2.8639>
- Ringo, D. S. (2024). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Jati Kesuna Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang*.
- Rukmana, H., Utami, W. B., & Darmanto. (2023). Pengaruh Penggunaan Dana Desa, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Majasto Kecamatan Tawang Sari. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 2(2), 307–316. <https://doi.org/10.53088/jikab.v2i2.43>
- Sakdiyah, L. R., Rani, U., & Bharata, R. W. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Keuangan Desa Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Bangsri). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(3). <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i3.1635>
- Saputra, D., & Fitriwati, L. (2023). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa X. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(1), 71–84. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v6i1.1215>
- Sari, N., Dasila, R. A., & Wahida, A. (2022). Pengaruh Transparansi Keuangan Desa Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 8(2), 341–354. <https://doi.org/10.24252/jiap.v8i2.32881>
- Warda, F., Mahmud, M., Sudirman, Hafid, R., & Ardiansyah. (2024). Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pengentasan Kemiskinan. *JAMBURA ECONOMIC EDUCATION JOURNAL*, 6(2).